

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* memandang bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk memenuhi kepentingan sendiri, tetapi juga berkewajiban memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemasok, pemerintah, serta masyarakat luas. Keberlangsungan perusahaan sangat ditentukan oleh dukungan *stakeholder*, sehingga perusahaan terdorong untuk mengelola hubungan secara strategis, termasuk melalui pengungkapan informasi. Tingkat perhatian perusahaan terhadap *stakeholder* dipengaruhi oleh kekuatan yang dimiliki masing-masing pihak, seperti kontrol atas sumber daya ekonomi, akses terhadap media, maupun kemampuan memengaruhi keputusan konsumsi (Ghozali & Chariri, 2014).

Seiring perkembangannya, teori *stakeholder* dibagi menjadi tiga dimensi yang mencakup etis, instrumental, dan manajerial. Sudut pandang etis menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan seluruh *stakeholder* secara adil tanpa membedakan tingkat kepentingannya. Instrumental melihat pengelolaan *stakeholder* sebagai sarana untuk mengidentifikasi hubungan antara pengelolaan *stakeholder* dengan pencapaian tujuan organisasi seperti profitabilitas dan pertumbuhan. Sementara itu, manajerial menjelaskan bahwa perhatian perusahaan terhadap *stakeholder* dipengaruhi oleh tingkat kekuatan dan kontrol mereka terhadap sumber daya strategis yang dibutuhkan perusahaan,

sehingga dalam praktiknya bersifat selektif dan disesuaikan dengan tingkat kepentingan masing-masing pihak (Rankin et al., 2018). Sejalan dengan hal tersebut, pengungkapan informasi yang transparan, termasuk *environmental, social, and governance disclosure*, dipandang sebagai salah satu respons perusahaan dalam memenuhi informasi *stakeholder* sekaligus membangun kepercayaan dan mempertahankan dukungan mereka terhadap keberlangsungan perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, informasi akuntansi berperan sebagai instrumen penting yang menjembatani hubungan antara perusahaan dan *stakeholder* melalui pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan, termasuk aspek sosial dan lingkungan, yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas sekaligus menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi *stakeholder* (Rankin et al., 2018). Pengungkapan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme mengurangi asimetri informasi, memperoleh dukungan, serta mempertahankan hubungan jangka panjang dengan *stakeholder*. Salah satu pengungkapan yang relevan adalah *environmental, social, and governance*, yang memungkinkan *stakeholder* menilai kinerja, risiko, dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi didasarkan pada konsep “kontrak sosial” antara perusahaan dan masyarakat, di mana keberlangsungan operasional perusahaan bergantung pada kesesuaian antara nilai-nilai perusahaan dengan norma dan ekspektasi sosial yang berlaku. Legitimasi dapat diartikan sebagai persepsi bahwa tindakan perusahaan telah selaras dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Apabila terjadi

ketidaksesuaian antara aktivitas perusahaan dan harapan masyarakat, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan perusahaan (Ghozali & Chariri, 2014).

Legitimasi bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan nilai dan ekspektasi masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara aktif mengidentifikasi dalam mengelola potensi kesenjangan legitimasi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi perubahan nyata dalam kinerja perusahaan maupun penyampaian informasi yang bertujuan membentuk persepsi publik. Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan menjadi salah satu instrumen utama untuk mempertahankan atau memperoleh legitimasi (Rankin et al., 2018).

Menurut Suchman (1995), legitimasi dapat dikelola melalui berbagai strategi yang mencakup penyesuaian praktik organisasi maupun upaya memengaruhi persepsi publik melalui komunikasi dan simbol. Penyesuaian dilakukan dengan mengarahkan aktivitas organisasi agar selaras dengan norma sosial, sedangkan pengelolaan persepsi dilakukan melalui penyampaian informasi yang relevan kepada masyarakat. Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh tindakan organisasi, tetapi juga oleh bagaimana tindakan tersebut dipersepsikan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, legitimasi menjadi faktor yang dapat memengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi ekspektasi sosial serta melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas, sehingga berpotensi memperoleh

legitimasi yang lebih baik. Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki tingkat eksposur publik yang lebih tinggi, sehingga memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menjaga legitimasi melalui penyesuaian aktivitas maupun transparansi informasi. Legitimasi yang terjaga dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang tercermin dalam peningkatan nilai perusahaan.

2.3 Kinerja Keuangan Perusahaan

2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan merupakan hasil dari proses analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku. Penilaian kinerja keuangan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan serta hasil kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Periode sebelumnya sekaligus menjadi dasar dalam memprediksi prospek perusahaan pada periode yang akan datang (Hutabarat, 2020).

2.3.2 Tujuan Kinerja Keuangan Perusahaan

Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan antara lain sebagai berikut (Hutabarat, 2020):

1. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi.

3. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan kemampuan membayar bunga utang, melunasi pokok utang, serta membayar dividen kepada pemegang saham secara tepat waktu.

2.3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan difokuskan pada aspek profitabilitas. Rasio profitabilitas memiliki peran penting tidak hanya bagi manajemen dan pihak pemilik usaha, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan (Lailatus Sa'adah et al., 2024). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu, ROA dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas operasional perusahaan dalam menciptakan keuntungan dari aset yang digunakan. Dengan demikian, nilai ROA yang tinggi mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal (Nugroho & Hersugondo, 2022).

2.4 *Disclosure*

2.4.1 *Pengertian Disclosure*

Disclosure atau pengungkapan merupakan penyampaian informasi secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga informasi tersebut tidak disembunyikan dan dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan harus memiliki nilai guna bagi para pengguna, karena tujuan utama dari pengungkapan adalah menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Berdasarkan sifatnya, pengungkapan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mandatory disclosure* yang merupakan pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, sedangkan *voluntary disclosure* adalah pengungkapan tambahan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan di luar kewajiban. Pengungkapan sukarela umumnya dilakukan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan investor, serta menurunkan biaya modal. Namun demikian, perusahaan juga dapat membatasi pengungkapan apabila informasi tersebut berpotensi merugikan posisi kompetitifnya (Ghozali & Chariri, 2014).

Tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan informasi pengguna dengan biaya dan risiko yang mungkin timbul akibat pengungkapan tersebut. Pengungkapan yang sedikit dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal, sedangkan pengungkapan yang berlebihan dapat menimbulkan kompleksitas informasi yang menyulitkan pengguna dalam memahami informasi yang relevan.

Oleh karena itu, perusahaan perlu menggunakan pertimbangan dalam menentukan informasi yang layak untuk diungkapkan (Galih et al., 2022).

2.4.2 *Environmental Disclosure*

Environmental disclosure (pengungkapan lingkungan) merupakan penyampaian informasi oleh perusahaan yang berkaitan dengan dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan serta upaya yang dilakukan untuk mengelola dan meminimalkan dampak tersebut. Pengungkapan ini mencerminkan tingkat transparansi perusahaan dalam menyampaikan kebijakan, tindakan, dan kinerja lingkungan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan (Ghozali & Chariri, 2014). Selain itu, *environmental disclosure* juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui berbagai aktivitas yang berkelanjutan (Farrah Noor & Patricia Maithy, 2025).

Informasi yang diungkapkan mencakup aspek, seperti tingkat emisi dan polusi, pengelolaan limbah, penggunaan energi dan sumber daya alam, serta upaya konservasi lingkungan. Perusahaan juga dapat mengungkapkan kebijakan lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta biaya dan risiko yang berkaitan dengan isu lingkungan (Ghozali & Chariri, 2014). Pengungkapan lingkungan memiliki peran strategis dalam menjaga legitimasi perusahaan serta meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan dengan dampak lingkungan yang signifikan cenderung menghadapi tekanan lebih besar untuk melakukan pengungkapan secara transparan, baik karena regulasi maupun tuntutan *stakeholder* (Farrah Noor & Patricia Maithy, 2025).

2.4.3 *Social Disclosure*

Social disclosure (pengungkapan sosial) merupakan penyampaian informasi terkait dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan individu. Pengungkapan ini berkembang seiring meningkatnya tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, meskipun belum terdapat definisi yang sepenuhnya seragam. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan sosial masih terus berkembang dibandingkan dengan pelaporan keuangan yang lebih mapan. Ruang lingkup pengungkapan sosial mencakup berbagai aspek, seperti kondisi kerja karyawan, kesejahteraan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta keselamatan kerja. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan keterlibatan dalam kegiatan sosial, seperti tanggung jawab sosial, kontribusi terhadap masyarakat, serta dampak aktivitas perusahaan terhadap kesejahteraan sosial. (Ghozali & Chariri, 2014).

Pengungkapan sosial memiliki peran strategis dalam membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan yang aktif melakukan pengungkapan sosial cenderung memperoleh legitimasi yang baik serta mampu meningkatkan reputasi di mata publik. Selain itu, pengungkapan sosial juga mencerminkan transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi non-keuangan, seperti praktik ketenagakerjaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kontribusi sosial perusahaan terhadap masyarakat. Dorongan untuk melakukan pengungkapan ini tidak hanya berasal dari regulasi, tetapi juga dari tekanan *stakeholder*, kebutuhan akan akuntabilitas, serta upaya menjaga citra perusahaan (Anita Sari & Siti Maryama, 2024).

2.4.4 *Governance Disclosure*

Governance disclosure (pengungkapan tata kelola) berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengatur hubungan antara manajemen dan pemangku kepentingan. Konsep *corporate governance* dapat dipahami dalam dua pola perspektif, yaitu sebagai perilaku perusahaan yang tercermin dalam kinerja, struktur pembiayaan, serta perlakuan terhadap pemegang saham dan *stakeholder*, serta sebagai kerangka normatif yang mencakup sistem hukum, regulasi, dan institusi yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Kedua perspektif ini penting dalam memahami bagaimana tata kelola perusahaan diterapkan baik dalam konteks operasional maupun dalam kerangka institusional yang lebih luas (Claessens, 2006).

Good Corporate Governance (GCG) secara umum didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep ini menekankan dua aspek utama, yaitu hal pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara transparan terkait kinerja, struktur kepemilikan, dan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik (Sudarmanto et al., 2021).

Informasi *governance disclosure* berkaitan dengan struktur organisasi, komposisi dewan direksi, kebijakan remunerasi manajemen, serta proses pengambilan keputusan yang transparan. Selain itu, pengungkapan ini juga meliputi sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk

memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Pengungkapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik (Anita Sari & Siti Maryama, 2024).

2.4.5 Pengukuran *Disclosure* Berdasarkan GRI

Pengukuran variabel *Environmental Disclosure*, *Social Disclosure*, and *Governance Disclosure* dilakukan dengan menggunakan standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional dan banyak digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dalam aspek *environmental*, *social*, and *governance*. Standar GRI menyediakan indikator yang terstruktur dan terukur untuk masing-masing aspek, sehingga penilaian menjadi lebih objektif, transparan, dan dapat dibandingkan antar perusahaan (GRI, 2021). Data pengukuran umumnya diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh ESG terhadap kinerja perusahaan dengan hasil yang beragam. Penelitian pertama dilakukan oleh Thi Nguyen (2026) dengan judul “*ESG Disclosure and Firm Performance: Evidence From the Vietnam Sustainability Index*”. Objek penelitian ini adalah 20 perusahaan yang terdaftar di Indeks Keberlanjutan Vietnam dari periode 2016-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan

masing-masing aspek *Environmental*, *Social*, *Governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aryati & Susilawati (2025) dengan judul “*Exploring the influence of ESG and prosperity disclosure score on financial performance*” menggunakan objek 84 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG secara agregat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, namun secara parsial, aspek lingkungan tidak berpengaruh namun aspek sosial dan tata kelola berpengaruh positif kinerja keuangan perusahaan.

Berikutnya, Rahmaniati & Ekawati (2024) dalam penelitian berjudul “*The role of Indonesia regulator on the effectiveness of ESG implementation in improving firms; non-financial performance*” menggunakan objek perusahaan publik yang terdaftar di BEI periode 2016–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG berpengaruh positif kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Soesetio et al. (2024) dengan judul “*The role of internasionalisation in moderating the impact of ESG disclosure on financial performance*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan *Environmental* dan *Governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, namun pengungkapan *Social* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Gutiérrez-Ponce & Wibowo (2023) berjudul “*Do Sustainability Activities Affect the Financial Performance of Banks? The Case of Indonesian Banks*” menggunakan objek perusahaan Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan., namun secara parsial, aspek lingkungan dan tata kelola berpengaruh negatif, dan aspek sosial berpengaruh positif kinerja keuangan perusahaan.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Gholami et al. (2022) berjudul “*Environmental, Social, Governance & Financial Performance Disclosure for Large Firm: Is This Different for SME Firm?*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan publik dan UKM yang terdaftar di Bursa Saham Australia periode 2007-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Thi Nguyen (2026)	Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan Variabel Independen: ESG Disclosure <i>(Environmental,</i>	20 perusahaan yang terdaftar di Indeks Keberlanjutan Vietnam dari periode 2016-2023	Pengungkapan ESG dan masing-masing aspek <i>Environmental, Social, Governance</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
		<i>Social, Governance)</i>		
2.	Aryati & Susilawati (2025)	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: ESG Disclosure (<i>Environmental, Social, Governance</i>)	84 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021	ESG secara agregat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Secara parsial, aspek lingkungan tidak berpengaruh namun aspek sosial dan tata kelola berpengaruh positif kinerja keuangan perusahaan.
3.	Rahmaniati & Ekawati (2024)	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: ESG	Perusahaan publik yang terdaftar di BEI (2016-2022)	ESG berpengaruh positif kinerja keuangan perusahaan.
4.	Soesetio et al. (2024)	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: ESG Disclosure	Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2021	Pengungkapan <i>Environmental</i> dan <i>Governance</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				Pengungkapan <i>Social</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5.	Gutiérrez-Ponce & Wibowo (2023)	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG)	Perusahaan Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2020	ESG berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Secara parsial, aspek lingkungan dan tata kelola berpengaruh negatif namun aspek sosial berpengaruh positif kinerja keuangan perusahaan.
6.	Gholami et al. (2022)	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Variabel Independen: <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG)	Perusahaan publik dan UKM yang terdaftar di Bursa Saham Australia periode 2007-2017	ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh *Environmental Disclosure* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Environmental disclosure, berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan serta upaya yang dilakukan dalam mengelola dan meminimalkan dampak tersebut, dalam perspektif teori *stakeholder*, *environmental disclosure* merupakan bentuk respons perusahaan terhadap tuntutan *stakeholder* yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap perusahaan (Ghozali & Chariri, 2014). Selain itu, dalam kerangka legitimasi, *environmental disclosure* digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dengan menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku (Suchman, 1995).

Di sisi lain, pengelolaan lingkungan yang efektif juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya, serta pengurangan limbah dan risiko lingkungan, dapat meningkatkan kinerja operasional dan mengurangi biaya jangka panjang (Gholami et al., 2022). Oleh karena itu, kinerja lingkungan tidak hanya berkontribusi pada aspek keberlanjutan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Gholami et al. (2022) yang menunjukkan bahwa aspek *environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{a1}: *Environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.6.2 Pengaruh *Social Disclosure* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Social disclosure mencerminkan penyampaian informasi terkait dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat, termasuk aspek ketenagakerjaan, kesejahteraan karyawan, serta kontribusi sosial perusahaan, dalam perspektif teori stakeholder, *social disclosure* menjadi sarana untuk membangun hubungan yang harmonis dengan *stakeholder*, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap perusahaan (Ghozali & Chariri, 2014). Sementara itu, teori legitimasi, memandang bahwa *social disclosure* upaya perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian aktivitasnya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat (Suchman, 1995).

Pengelolaan aspek sosial yang baik dapat meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat serta memperkuat citra dan reputasi perusahaan. Reputasi yang positif akan memberikan keunggulan kompetitif, termasuk peningkatan kepercayaan publik dan daya tarik bagi investor, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Aryati & Susilawati (2025) dan Gutiérrez-Ponce & Wibowo (2023) yang menemukan bahwa secara parsial *social disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{a2}: *Social disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.6.3 Pengaruh *Governance Disclosure* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Governance disclosure berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk struktur organisasi, pengawasan, serta transparansi dalam pengambilan keputusan, dalam perspektif teori *stakeholder*, *governance disclosure* yang baik dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* karena perusahaan dianggap lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya (Rankin et al., 2018). Selain itu, dalam teori legitimasi, *governance disclosure* berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan praktik tata kelola yang sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku (Suchman, 1995)

Hasil penelitian terdahulu menurut Aryati & Susilawati (2025) menemukan bahwa secara parsial aspek *governance disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Didukung oleh Rahmaniati & Ekawati (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan ESG, termasuk aspek *governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan *governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui peningkatan transparansi, pengawasan, serta kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{a3}: *Governance disclosure* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.